

**LAPORAN KONSOLIDASI DATA
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
PEMERINTAH KOTA JAMBI**

Periode Data: September 2020 – September 2026

I. Pendahuluan

Konsolidasi data pelayanan informasi publik merupakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, dan penyajian data permohonan informasi publik yang tercatat dalam sistem/rekapitulasi pelayanan PPID. Konsolidasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Pemerintah Kota Jambi serta menjadi bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan informasi publik.

II. Maksud dan Tujuan

- menghimpun data permohonan informasi publik secara terintegrasi;
- mengetahui jumlah dan karakteristik permohonan informasi publik;
- memetakan OPD yang menjadi tujuan permohonan informasi;
- mengetahui status penyelesaian permohonan, termasuk permohonan yang dikembalikan, diproses, dan dikecualikan;
- menjadi bahan evaluasi peningkatan kualitas dan ketepatan pelayanan informasi publik.

III. Sumber dan Ruang Lingkup Data

Data bersumber dari file rekapitulasi “Data Permohonan” yang memuat 60 permohonan informasi publik dengan rentang tanggal permohonan dari 01 September 2020 sampai 16 August 2026.

Variabel yang dikonsolidasikan meliputi OPD tujuan, kategori pemohon, nomor registrasi, tanggal permohonan, rincian informasi, tujuan penggunaan, cara memperoleh informasi, jenis salinan, cara mendapatkan salinan, status pelayanan, dan informasi pengalihan.

IV. Hasil Konsolidasi

Secara keseluruhan terdapat 60 permohonan informasi publik. Sebaran tahunan adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2020	6	10.0%
2	2021	7	11.7%
3	2022	6	10.0%
4	2023	7	11.7%
5	2024	12	20.0%
6	2025	18	30.0%
7	2026	4	6.7%

1. Rekapitulasi Berdasarkan Status Pelayanan

No	Status	Jumlah	Persentase
1	Selesai	34	56.7%
2	Dikembalikan	15	25.0%
3	Dalam Proses	7	11.7%
4	Dikecualikan	3	5.0%
5	Belum Diproses	1	1.7%

Dari 60 permohonan, 34 (56.7%) berstatus Selesai. Sebanyak 15 (25.0%) dikembalikan, 7 (11.7%) masih dalam proses, 3 (5.0%) dikecualikan, dan 1 (1.7%) belum diproses. Berdasarkan status yang tercatat, permohonan yang telah berstatus selesai, dikembalikan, atau dikecualikan berjumlah 52 (86.7%).

2. Rekapitulasi Berdasarkan Kategori Pemohon

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Perorangan	48	80.0%
2	Lembaga/Organisasi	9	15.0%
3	Lembaga	3	5.0%

3. Rekapitulasi Berdasarkan OPD Tujuan

No.	OPD Tujuan	Jumlah
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7
2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7
3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6
4	DINAS PENDIDIKAN	5
5	DINAS KESEHATAN	5
6	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	5
7	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	3
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	2
11	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1

14	BAGIAN HUKUM	1
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1
16	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1
17	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1
19	SEKRETARIAT DPRD	1
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1
21	DINAS PERHUBUNGAN	1
22	DINAS SOSIAL	1

4. Cara Memperoleh Informasi

No	Cara	Jumlah	Persentase
1	Membaca	39	65.0%
2	Melihat	17	28.3%
3	Mencatat	4	6.7%

5. Jenis Salinan Informasi

No	Jenis Salinan	Jumlah	Persentase
1	Softcopy	57	95.0%
2	Hardcopy	3	5.0%

6. Cara Mendapatkan Salinan Informasi

No	Cara	Jumlah	Persentase
1	Email	58	96.7%
2	Mengambil Langsung	2	3.3%

7. Status Pengalihan Permohonan

Seluruh 60 data permohonan tercatat dengan kode pengalihan “N”, sehingga pada data yang dikonsolidasikan tidak terdapat permohonan yang tercatat dialihkan.

V. Analisis dan Evaluasi

Data menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik telah mencakup berbagai perangkat daerah, dengan 22 OPD menjadi tujuan permohonan. Permohonan terbanyak tercatat pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, sebanyak 7 permohonan.

Berdasarkan kategori pemohon, permohonan didominasi kategori Perorangan sebanyak 48 permohonan (80.0%).

Dalam metode memperoleh informasi, membaca tercatat sebanyak 39 permohonan (65.0%). Untuk salinan informasi, softcopy mendominasi dengan 57 permohonan (95.0%), sedangkan cara mendapatkan salinan paling banyak melalui email.

Data status pelayanan perlu dipantau secara berkala, khususnya terhadap permohonan yang masih berstatus Dalam Proses dan Belum Diproses, agar tindak lanjut dan penyelesaian dapat terdokumentasi dengan baik.

VI. Rekomendasi

- melakukan pemutakhiran data pelayanan informasi secara berkala dan terjadwal;
- melakukan verifikasi kesesuaian antara data pada sistem pelayanan, register permohonan, dan dokumen tindak lanjut;
- memberikan perhatian khusus terhadap permohonan yang masih dalam proses atau belum diproses;
- menyeragamkan format pelaporan PPID Pelaksana agar memudahkan konsolidasi tingkat Pemerintah Kota;
- mendokumentasikan setiap keputusan pemberian, pengembalian, penolakan, atau pengecualian informasi beserta dasar pertimbangannya;
- menggunakan hasil konsolidasi sebagai bahan evaluasi pelayanan dan penyusunan laporan layanan informasi publik.

VII. Penutup

Laporan Konsolidasi Data Pelayanan Informasi Publik ini disusun sebagai gambaran atas pelaksanaan pelayanan informasi berdasarkan data permohonan yang tersedia. Hasil konsolidasi diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam meningkatkan kualitas, ketepatan, keterbukaan, dan akuntabilitas pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Jambi



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Jambi

M.SALEH RIDHA,STP.ME

Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19800908 199810 1 001